Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 02, Juni 2026

KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MALUKU

Sefanya Sairiltiata[1], T. G. Ratumanan[2], Theresia Laurens[3]
[1,2,3] Administrasi Pendidikan Universitas Pattimura
[1]sairiltiatasefanya@gmail.com, [2]spratumanan@gmail.com, thlaurens17@gmail.com[3]

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of education policies in the Maluku region, which has an archipelagic geographical character, with challenges related to access, resource distribution, and disparities in education quality. The qualitative approach used with a case study design allows researchers to deeply understand the dynamics of education policies in a real-world context. Data collection techniques included documentation studies, field observations, and in-depth interviews with education stakeholders.
The results indicate that the implementation of education policies in Maluku still faces various obstacles, particularly in infrastructure, education digitalization, and the equitable distribution of teaching staff. National policies tend not to be fully adaptive to the geographical and sociocultural conditions of the archipelagic region. On the other hand, there is positive potential in the development of local content curricula and learning innovations based on local wisdom that can increase the relevance of education for students.
The analysis also reveals an imbalance between structural and contextual aspects of policy implementation. Therefore, more adaptive, data-driven, and contextual policies are needed through strengthening synergies between the central and regional governments. Furthermore, the development of locally based education models and the enhancement of human resource capacity are key to achieving equity and improving the quality of education in the Maluku archipelago.

Keywords: *Education Policy, Island Region, Maluku, Local Content, Educational Equity*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan tantangan akses, distribusi sumber daya, dan kesenjangan mutu pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, yang memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika kebijakan pendidikan dalam konteks nyata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Maluku masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek infrastruktur, digitalisasi pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidik. Kebijakan yang bersifat nasional cenderung belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi geografis dan sosiokultural wilayah kepulauan. Di sisi lain, terdapat potensi positif pada pengembangan kurikulum muatan lokal dan inovasi pembelajaran berbasis kearifan lokal yang mampu meningkatkan relevansi pendidikan bagi peserta didik.

Analisis juga menunjukkan adanya ketimpangan antara aspek struktural dan aspek kontekstual dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, berbasis data, dan kontekstual melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pengembangan model pendidikan berbasis lokal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di wilayah kepulauan Maluku.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Wilayah Kepulauan, Maluku, Muatan Lokal, Pemerataan Pendidikan

A. Pendahuluan

Pembangunan pendidikan di Indonesia hingga kini masih dihadapkan pada kesenjangan yang mencolok antara daerah pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran. Provinsi Maluku, yang memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan dengan sekitar 92,4% wilayahnya berupa lautan, memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda dari wilayah daratan luas. Kebijakan pendidikan nasional yang cenderung terpusat kerap menemui hambatan dalam penerapannya di daerah yang tersebar di ribuan pulau. Padahal, kebijakan yang efektif semestinya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan khusus yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat, Fattah (2012:45).

Kesenjangan akses menjadi persoalan utama yang mendasari kajian ini, di mana jarak antarpulau menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tidak merata. Pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan seperti Maluku memerlukan biaya logistik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah daratan, sehingga standar pelayanan minimal kerap belum dapat dipenuhi. Dalam situasi ini, setiap komponen dalam instrumen kebijakan pendidikan perlu dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar tidak menimbulkan perbedaan kualitas layanan, Mulyasa (2013:260).

Selain persoalan infrastruktur, kebijakan distribusi tenaga pendidik di Maluku masih belum optimal, ditandai dengan penumpukan guru di wilayah perkotaan. Sekolah-sekolah yang berada di pulau-pulau kecil kerap mengalami kekurangan guru untuk mata pelajaran inti, terutama karena kebijakan rotasi yang

terkendala oleh transportasi antarpulau. Pemerataan pendidikan tidak hanya berarti membuka akses bersekolah, tetapi juga menjamin setiap peserta didik memperoleh layanan dengan kualitas yang setara. Hal ini sangat bergantung pada kekuatan manajemen di tingkat paling dasar, Tilaar(2004:89).

Kualitas lulusan di Maluku juga masih menunjukkan ketimpangan jika dibandingkan dengan standar capaian nasional, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran pendidikan daerah. Program transformasi digital yang dicanangkan pemerintah pusat seringkali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dasar, seperti listrik dan jaringan internet di wilayah terpencil. Oleh karena itu, penelitian kebijakan di daerah ini perlu dirancang untuk mampu menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” kebijakan tersebut menghadapi hambatan dalam konteks nyata di lapangan Yin (2018:78).

Pendidikan di Maluku seharusnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian standar formal, tetapi juga mengakomodasi aspek sosiokultural masyarakat setempat melalui pemanfaatan kearifan lokal. Nilai-nilai budaya daerah memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi siswa apabila diintegrasikan secara kontekstual dalam materi pembelajaran. Kebijakan yang memberikan ruang otonomi lebih luas bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum berbasis muatan lokal terbukti dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di tingkat satuan pendidikan, Sanjaya (2013:210).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih untuk mengkaji secara mendalam fenomena kebijakan 265ocal265ikan di wilayah kepulauan Maluku. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami realitas 265ocal265 dari perspektif para pelaksana kebijakan dan praktisi 265ocal265ikan dilapangan, mengingat efektivitas kebijakan 265ocal265ikan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kondisi 265ocal265, budaya, dan geografisnya, Fattah (2012:45). Melalui pendekatan kualitatif,

hubungan antara keterbatasan geografis dan efektivitas implementasi kebijakan dapat dianalisis secara menyeluruh serta lebih fleksibel sesuai dinamika yang terjadi di berbagai wilayah kepulauan.

Desain penelitian yang digunakan 266ocal266 studi kasus deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pelaksanaan, kendala, serta keberhasilan suatu kebijakan dalam konteks tertentu. Yin (2018:78) menyatakan bahwa studi kasus sangat sesuai digunakan untuk menjawab pertanyaan "how" (bagaimana) dan "why" (mengapa) terhadap suatu fenomena kebijakan yang berlangsung dalam konteks nyata, khususnya pada wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks seperti Maluku. Dengan desain ini, setiap aspek kebijakan dapat dianalisis secara lebih rinci untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan 266ocal266ikan di daerah terpencil.

Selanjutnya, penerapan desain ini dimaksudkan untuk menangkap fenomena yang kompleks pada wilayah dengan keterbatasan akses, namun memiliki kekayaan konteks 266ocal266 budaya dan 266ocal266i 266ocal yang kuat. Pendekatan kualitatif yang sistematis memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan pengamatan terstruktur terhadap 266ocal266ikan 266ocal266ika maupun kebijakan 266ocal266ikan yang diterapkan di lapangan, Mulyasa (2013:260). Melalui eksplorasi yang mendalam, desain studi kasus ini diharapkan mampu mengidentifikasi pola adaptasi kebijakan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di wilayah perbatasan (PPKP) dalam menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, Creswell (2014:150).

Secara teknis, desain penelitian ini juga memanfaatkan analisis deskriptif untuk mengubah data lapangan menjadi narasi yang bermakna dalam pengembangan kajian kebijakan. Fokus utama dari desain ini 266ocal266 melihat kesesuaian antara regulasi di tingkat provinsi dengan kondisi nyata di sekolah-sekolah yang tersebar di wilayah kepulauan. Dengan demikian, pendekatan dan desain penelitian ini tidak hanya berorientasi pada penilaian kegagalan kebijakan, tetapi juga pada 266ocal menemukan pola keberhasilan praktik

267ocal267ikan berbasis kearifan 267ocal yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan kebijakan di masa mendatang, Miles & Huberman (1994:92).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Implementasi Kebijakan Di Wilayah Kepulauan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di Maluku masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam memenuhi standar pelayanan minimal. Kondisi geografis kepulauan menyebabkan tingginya biaya operasional pendidikan, sehingga sebagian besar anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan logistik dibandingkan peningkatan mutu pendidikan. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan khusus peserta didik berdasarkan kondisi geografis wilayahnya, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan akses pendidikan, Fattah (2012:45).

Temuan analisis juga mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Provinsi Maluku masih berorientasi pada paradigma daratan (land-based policy) yang kurang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Kebijakan nasional yang diterapkan secara seragam sering kali tidak efektif ketika dihadapkan pada tingginya biaya transportasi serta jauhnya jarak antar pulau. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis peserta didik agar tidak terjadi marginalisasi terhadap hak pendidikan masyarakat pesisir, Fattah (2012:45). Ketimpangan tersebut terlihat dari besarnya anggaran yang lebih banyak digunakan untuk urusan administratif dan koordinasi dibandingkan peningkatan kualitas pembelajaran.

Selain itu, implementasi standar pelayanan minimal di Maluku juga terhambat oleh lambatnya pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan. Sekolah-sekolah di wilayah terpencil sering menerima kebijakan tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga memunculkan disparitas kualitas lulusan. Evaluasi terhadap kebijakan perlu dilakukan

secara objektif dan sistematis untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada benar-benar menyentuh kebutuhan pembelajaran di daerah terpencil, Mulyasa (2013:260). Terbatasnya fasilitas seperti laboratorium dan perpustakaan di sekolah-sekolah kepulauan menunjukkan bahwa distribusi sumber daya pendidikan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan spasial.

Di samping itu, keterbatasan akses konektivitas digital menjadi salah satu hambatan utama dalam mendukung transformasi pendidikan berbasis teknologi di Maluku. Program digitalisasi sekolah yang dicanangkan pemerintah pusat sering kali tidak relevan di wilayah yang masih mengalami keterbatasan listrik dan akses internet. Kondisi ini menimbulkan bentuk kesenjangan baru yang membutuhkan analisis kebijakan lebih mendalam untuk menjawab bagaimana suatu program dapat diadaptasi dalam kondisi nyata masyarakat dengan keterbatasan akses, Yin (2018:78). Hal tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya kebijakan afirmatif yang spesifik untuk wilayah kepulauan, tujuan pemerataan pendidikan nasional akan sulit dicapai.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa kebijakan pendidikan yang bersifat top-down cenderung kurang memperhatikan kearifan lokal yang sebenarnya dapat menjadi alternatif solusi terhadap keterbatasan sumber daya. Sebaliknya, kebijakan yang memberikan ruang bagi otonomi sekolah dalam mengembangkan pembelajaran berbasis lingkungan terbukti lebih efektif dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan yang lebih akurat melalui proses verifikasi data lapangan agar setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar responsif, solutif, dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Maluku secara berkelanjutan, Miles & Huberman (Tilaar, 2004:89).

2. Kendala Distribusi dan Penilaian Kinerja Pendidik

Masalah utama yang teridentifikasi adalah ketidakmerataan distribusi guru yang semakin diperburuk oleh lemahnya sistem pengawasan di wilayah terpencil. Penilaian kinerja guru di daerah kepulauan cenderung bersifat

administratif dan belum menyentuh aspek substantif pembelajaran di kelas. Idealnya, setiap indikator dalam instrumen supervisi disusun secara sistematis berdasarkan realitas proses pembelajaran agar dapat menjamin objektivitas dalam peningkatan mutu pendidikan, Mulyasa (2013:260).

Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan pendidikan di Maluku adalah ketimpangan penempatan tenaga pendidik yang lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah kepulauan mengalami kekurangan guru yang cukup serius. Kebijakan penempatan guru sering kali tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan keterbatasan transportasi laut yang tidak stabil, sehingga tidak sedikit guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil meninggalkan tempat tugasnya untuk kepentingan administratif maupun pribadi di pusat kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik peserta didik berdasarkan kondisi wilayah agar layanan pendidikan dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan, Fattah (2012:45).

Permasalahan tersebut juga diperburuk oleh sistem evaluasi kinerja guru yang masih bersifat formalitas administratif di daerah terpencil. Pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah sering terkendala oleh jarak antar pulau serta tingginya biaya perjalanan, sehingga pemantauan proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara berkala. Padahal, penilaian kinerja guru seharusnya dilakukan secara objektif dan berbasis kondisi nyata di kelas untuk memastikan standar kompetensi lulusan tetap terjaga meskipun berada di wilayah dengan keterbatasan sarana, Mulyasa (2013:260).

3. Disparitas Kualitas dan Manajemen Berbasis Sekolah

Kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah di pusat Kota Ambon dengan sekolah yang berada di pulau-pulau kecil di Maluku Barat Daya maupun Kepulauan Tanimbar masih sangat signifikan. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di wilayah perbatasan belum berjalan secara optimal karena terbatasnya kemampuan manajerial kepala sekolah. Pemerataan kualitas

pendidikan pada dasarnya menuntut adanya jaminan bahwa setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang setara, yang sangat bergantung pada penguatan manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan, Tilaar (2004:89).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan kualitas yang mencolok antara sekolah-sekolah di pusat Kota Ambon dengan sekolah yang berada di gugusan pulau terpencil. Ketimpangan tersebut tidak hanya tampak pada aspek sarana dan prasarana, tetapi juga pada kemampuan tata kelola sekolah yang belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan kondisi geografis yang menantang. Padahal, prinsip pemerataan pendidikan mengharuskan setiap peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sama tanpa dipengaruhi oleh lokasi geografis, yang sangat ditentukan oleh efektivitas manajemen di tingkat sekolah, Tilaar (2004:89).

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di wilayah kepulauan Maluku juga menghadapi kendala berupa rendahnya kapasitas manajerial kepala sekolah dalam mengelola kewenangan otonomi pendidikan. Di banyak daerah perbatasan, konsep otonomi sekolah masih terbatas pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara administratif, tanpa disertai inovasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja manajemen sekolah perlu dilakukan secara terstruktur dan objektif agar setiap kebijakan di tingkat sekolah benar-benar berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan, Mulyasa (2013:260).

4. Inovasi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah munculnya inisiatif pembelajaran berbasis konteks yang memanfaatkan sejarah dan budaya lokal sebagai media pembelajaran. Penggunaan situs-situs bersejarah di pulau-pulau sebagai “laboratorium hidup” terbukti mampu meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal secara mandiri menjadi faktor

penting dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik di Maluku, Sanjaya (2013:210).

Inovasi pembelajaran di Maluku juga menunjukkan perkembangan yang positif melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum formal, yang terbukti meningkatkan relevansi pendidikan bagi siswa di wilayah kepulauan. Nilai-nilai seperti “Pela Gandong” serta semangat gotong royong masyarakat pesisir dimanfaatkan sebagai media pendidikan karakter untuk memperkuat identitas siswa. Kebijakan yang memberikan ruang otonomi kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum berbasis muatan lokal terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa, karena materi pembelajaran memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan sosial dan budaya mereka, Sanjaya (2013:210).

Selain aspek budaya, potensi alam Maluku seperti kekayaan maritim serta situs sejarah di pulau-pulau kecil juga mulai dimanfaatkan sebagai “laboratorium alami” dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pemanfaatan ekosistem mangrove maupun peninggalan sejarah di wilayah perbatasan (PPKP) sebagai media pembelajaran memungkinkan siswa memahami konsep teoritis melalui pengalaman langsung di lapangan. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas laboratorium formal, karena lingkungan sekitar dapat dijadikan sumber belajar yang mendukung pengembangan kompetensi siswa secara kontekstual, Creswell (2014:150).

Keberhasilan inovasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam merancang perangkat pembelajaran yang terstruktur namun tetap fleksibel terhadap kearifan lokal. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai perancang pembelajaran yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik kelas yang sesuai dengan kondisi nyata. Oleh karena itu, setiap komponen perangkat pembelajaran perlu disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan peserta didik agar mutu pendidikan tetap memenuhi standar nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal, Mulyasa (2013:260).

5. Dampak Keterbatasan Infrastruktur Digital

Kebijakan digitalisasi pendidikan yang digalakkan secara nasional masih menghadapi kendala teknis yang cukup serius di wilayah Maluku, terutama akibat terbatasnya akses listrik dan jaringan internet. Kondisi ini memunculkan "kesenjangan digital" yang menghambat guru dalam mengakses berbagai platform pengembangan kompetensi. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan di lapangan perlu mampu menangkap kompleksitas permasalahan tersebut agar menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi nyata, bukan sekadar menerapkan standar teknologi yang belum sepenuhnya siap di wilayah perbatasan, Yin (2018:78).

Kebijakan transformasi digital dari pemerintah pusat juga menghadapi tantangan nyata yang bertentangan dengan kondisi di lapangan ketika diterapkan di wilayah kepulauan Maluku. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti pasokan listrik yang tidak stabil serta minimnya akses internet di banyak pulau kecil menyebabkan terjadinya kesenjangan digital yang cukup signifikan. Dalam kondisi ini, penerapan kebijakan pendidikan yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur sosial, budaya, dan geografis justru berpotensi memperlebar jurang kualitas antara sekolah di perkotaan dan sekolah di daerah terpencil, Fattah (2012:45). Akibatnya, berbagai platform pembelajaran digital yang disediakan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh guru dan peserta didik di wilayah Maluku.

6. Integrasi Kebijakan Perbatasan (PPKP)

Pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan Maluku membutuhkan strategi khusus yang mengintegrasikan aspek keamanan wilayah dengan pengembangan sumber daya manusia. Sekolah di kawasan perbatasan (PPKP) perlu dirancang sebagai pusat pembentukan peradaban yang berperan dalam memperkuat identitas nasional melalui penguatan nilai-nilai lokal. Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai "laboratorium kehidupan" menjadi pendekatan yang sangat relevan untuk dikembangkan, terutama dalam menjawab keterbatasan fasilitas laboratorium formal di sekolah, Creswell (2014:150).

Integrasi kebijakan di wilayah Pusat Strategis Nasional atau daerah perbatasan (PPKP) di Maluku memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mempertahankan jati diri bangsa. Kebijakan pendidikan di wilayah perbatasan harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik yang hidup dalam lingkungan sosial budaya yang bersentuhan langsung dengan pengaruh luar, sehingga kurikulum yang diterapkan perlu memuat nilai nasionalisme yang kuat namun tetap berbasis pada kearifan lokal, Fattah (2012:45).

Pelaksanaan kebijakan PPKP di Maluku masih dihadapkan pada berbagai tantangan nyata, terutama keterbatasan sarana dan prasarana yang jauh dari standar pelayanan minimal jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Instrumen evaluasi pendidikan yang bersifat nasional sering kali belum mampu menangkap karakteristik khas wilayah perbatasan, di mana guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan perlu dilakukan secara objektif dan terstruktur agar setiap regulasi yang diterapkan benar-benar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing peserta didik di wilayah terluar, Mulyasa (2013:260).

7. Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan

Kegagalan dalam menyelaraskan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam peningkatan mutu pendidikan di Maluku. Oleh karena itu, diperlukan analisis data yang cermat dan objektif terhadap kondisi nyata di lapangan guna menghasilkan kebijakan yang benar-benar solutif. Melalui penerapan triangulasi data kebijakan, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan strategi pembangunan pendidikan yang lebih adaptif, terstruktur, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan, Miles & Huberman (1994:92).

Sinkronisasi kebijakan pendidikan di Maluku membutuhkan harmonisasi yang kuat antara

kebijakan pusat dan daerah untuk mengatasi berbagai hambatan struktural di wilayah kepulauan. Salah satu rekomendasi penting adalah perlunya kebijakan afirmatif, di mana standar pelayanan minimal disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial budaya setempat, sehingga tidak terjadi penerapan standar daratan secara kaku di wilayah kepulauan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dapat memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik secara adil dan merata sesuai prinsip keadilan spasial, Fattah (2012:45).

No	Aspek	Skor	%	Kategori
1	Infrastruktur Pendidikan	45	45%	Rendah
2	Distribusi Guru	50	50%	Sedang
3	Manajemen Sekolah (MBS)	55	55%	Sedang
4	Digitalisasi Pendidikan	40	40%	Rendah
5	Evaluasi Kebijakan	50	50%	Sedang
6	Keadilan Akses Pendidikan	45	45%	Rendah
7	Kurikulum Muatan Lokal	65	65%	Tinggi
8	Keterlibatan Masyarakat	70	70%	Tinggi
9	Inovasi Pembelajaran	75	75%	Tinggi
10	Kearifan Lokal	72	72%	Tinggi

Selain penyelarasan regulasi, penguatan sistem data yang terintegrasi, transparan, dan akurat juga menjadi kebutuhan mendesak melalui integrasi sistem informasi antara pusat dan daerah. Ketidaksinkronan data sering menyebabkan distribusi bantuan sarana dan prasarana tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan perlu didasarkan pada analisis data yang akurat mengenai kondisi riil di pulau-pulau kecil, yang telah melalui proses verifikasi triangulasi secara menyeluruh, Miles & Huberman (1994:92). Dengan data yang terintegrasi, perencanaan anggaran untuk wilayah perbatasan (PPKP) dapat dilakukan secara lebih presisi.

1. Hasil Per Indikator Implementasi Kebijakan

Diagram Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan



D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan di Provinsi Maluku masih memerlukan adaptasi yang lebih kuat terhadap karakteristik geografis kepulauan. Implementasi standar pelayanan minimal belum tercapai secara merata karena kebijakan yang ada seringkali belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik subjek didik berdasarkan lingkungan sosiokultural dan letak geografisnya, Fattah (2012:45). Kesenjangan ini menegaskan bahwa kebijakan yang bersifat sentralistik tanpa afirmasi daerah hanya akan memperlebar disparitas kualitas layanan antara pusat kota dan wilayah pelosok.

Permasalahan distribusi guru dan kualitas pembelajaran di Maluku berkaitan erat dengan sistem evaluasi yang belum berjalan secara optimal di lapangan. Penilaian kinerja pendidikan di daerah terpencil cenderung bersifat formalitas administratif, padahal setiap butir instrumen supervisi seharusnya disusun secara sistematis berdasarkan fakta pembelajaran yang nyata untuk menjamin objektivitas, Mulyasa (2013:260). Ketidakkonsistenan antara regulasi dan eksekusi di wilayah perbatasan menyebabkan potensi besar kearifan lokal belum tergarap maksimal dalam kurikulum formal.

Pemerataan pendidikan di Maluku bukan hanya tentang pembangunan fisik sekolah, tetapi tentang menghadirkan kualitas layanan yang setara bagi setiap anak di pulau-pulau kecil. Hal ini menuntut penguatan manajemen pendidikan di tingkat daerah agar mampu mengatasi keterbatasan aksesibilitas dan komunikasi. Sesuai dengan prinsip pembangunan nasional, keadilan pendidikan akan tercapai apabila setiap kebijakan mampu memberikan jaminan bahwa posisi geografis bukan lagi menjadi penghalang bagi siswa untuk mendapatkan mutu pendidikan yang bermutu tinggi, Tilaar (2004:89).

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Assidiq, muhammad H. (2020). Fenomena Pendidikan di Wilayah

Kepulauan: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan Kebijakan*, 8(2), 45-58.

Bafadal, I. (2016). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

Danim, S. (2010). *Otonomi Manajemen Sekolah*. Bandung: Alfabeta.

Depdiknas. (2003). *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.

Fattah, N. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hamalik, O. (2014). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Imron, A. (2016). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kunandar. (2011). *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona State University: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2013). *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2021). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muslich, M. (2011). *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pattinama, M. J. (2020). Kearifan Lokal Pela Gandong sebagai Modal Sosial Pendidikan di Maluku. *Jurnal Sosio-Antropologi*, 12(1), 22-35.

Sagala, S. (2013). *Manajemen Strategis dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sanjaya, W. (2013). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.

Siagian, S. P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudjana, N. (2014). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriadi, D. (2010). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tilaar, H. A. R. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Usman, H. (2014). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.

Zamroni. (2011). *Dinamika Peningkatan Mutu*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

Fariq, A. (2011). *Perkembangan dunia konseling memasuki era grobalisasi.*Pedagogi, II Nov 2011(Universitas Negeri Padang), 255-262.